

# LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III TAHUN 2023



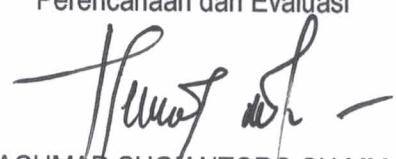
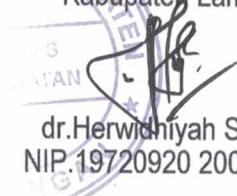
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS KESEHATAN

Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo Nomor 57 Lamongan Kode Pos :62211  
Telp.(0322) 321338, Fax 0322 321 338  
E-mail :dinkes@lamongan.go.id Web Site : www.lamongankab.go.id

|                |   |      |
|----------------|---|------|
| NO DOKUMEN     | : |      |
| TANGGAL TERBIT | : | 2023 |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Disiapkan Oleh | : | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan dan Evaluasi<br><br>ACHMAD SUGIANTORO,SH,MM<br>NIP.19740119 199403 1 002        |
| Diperiksa      | : | Sekretaris<br>Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan<br>NIP.   |
| Disahkan Oleh  | : | Plt.Kepala Dinas Kesehatan<br>Kabupaten Lamongan<br><br>dr.Herwidhiyah Shidayatri<br>NIP.19720920 200212 2 002 |

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Selanjutnya manajemen risiko pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- a. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- b. Identifikasi risiko ;
- c. Analisis risiko ;
- d. Evaluasi risiko ;
- e. Pengendalian risiko ;
- f. Pemantauan dan telaah ulang ;
- g. Koordinasi dan komunikasi.

## **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

### **A.RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III**

Dinas kesehatan Kabupaten lamongan telah menyusun kegiatan – Kegiatan pengendalian terhadap risiko – risiko yang dilaksanakan pada Tribulan III sebagaimana terlampir.

### **B.RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III**

Dinas Kesehatan kabupaten lamongan telah melaksanakan kegiatan - kegiatan pengendalian terhadap risiko – risiko yang dilaksanakan pada Tribulan III sebagaimana terlampir

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko antara lain Keterbatasan kapasitas ASN pengelola managemen risiko sehingga menjadi penghambat dalam merumuskan rencana tindak pengendalian terhadap risiko yang ada.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum perlu dilakukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya,dari hasil capaian kinerja yang sudah terealisasi menandakan bahwa risiko sudah dapat di minimalisir dan sisa risiko dapat diselesaikan pada tribulan IV.Sehingga Rencana tindak pengendalian yang sudah ada untuk terus dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana yang sudah di tentukan sampai dengan akhir tahun.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat simpulan bahwa sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai upaya perbaikan.selain itu peranan unit pengendali risiko sangat penting dalam pengelolaan risiko di mulai dari identifikasi risiko,pelaksanaan kegiatan,penyusunan rencana tindak pengendalian dan pemantauan.sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja kami akan melakukan evaluasi dan review terhadap rencana tindak pengendalian secara terpadu serta peningkatan kapasitas SDM pengelola Risiko.

# **LAMPIRAN**

**Formulir Kertas Kerja**

**Rancangan Remantauan Atas Pengendalian Intenai**

|                        |   |                               |
|------------------------|---|-------------------------------|
| Nama Pemda             | : | Pemerintah Kabupaten Lamongan |
| Tahun Penilaian        | : | 2023                          |
| Tujuan Strategis Pemda | : | Kesehatan                     |
| Urusan Pemerintahan    | : | Dinas Kesehatan               |
| Dinas Terkait          | : | Dinas Kesehatan               |

| No   | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan   | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan  | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Risiko Strategis OPD Dinas Kesehatan:</b> |   |   |                             |                                      |                             |            |
| 1  | 1.Pemberian PMT balita Gizi buruk 2.Aksi bergizi melalui inovasi Ferameg(fe hari rabu pada remaja putri) 3.Pemanatanuan EPBGGM 4.Melaksanakan On Job Training pada Nakes 5.Memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui LASERKU 6.Pemantauan PD3I melalui aplikasi ASIK 7.Possbindu PTM skrinig pada penderita DM dan HT pemantauan pelaporan 8.Relaksanaan Reakreditasi Puskesmas | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutanmelalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi  | Sekretaris Dinas kesehatan  | TB 1,2,3,4                           | TB 1,2,3,4                  | Terlaksana |
| 2  | 1.Sosialisasi pada nakes 2.pemetaan data nakes 3.Perijinan online mempercepat birokrasi 4.Uji kompetensi pada nakes   | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutanmelalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi  | Sekretaris Dinas kesehatan  | TB 1,2,3,4                           | TB 1,2,3,4                  | Terlaksana |
| 3  | 1.Pengentrian pengadaan alkes dan obat melalui aplikasi syrup 2.Pemantauan LPLPO dan stok opname tiap akhir bulan   | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutanmelalui Sarana komunikasi (WA) sosialisasi,rapat koordinasi | Sekretaris Dinas kesehatan  | TB 1,2,3,4                           | TB 1,2,3,4                  | Terlaksana |

|  |   |   |                  |            |            |            |
|--|---|---|------------------|------------|------------|------------|
| 4  | Kegiatan pemberdayaan di masyarakat melalui posyandu remaja,posyandu Lansia dan Posbindu PTM              | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutammelalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi  | Sekretaris Dinas | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | Terlaksana |
| <b>Risiko Operasional OPD Dinas Kesehatan:</b> |   |   |                  |            |            |            |
| 1  | Penguatan dari atasan kepada semua bidang u laporan tepat waktu   | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutammelalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi  | Sekretaris Dinas | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | Terlaksana |
| 2  | Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Kegiatan,Dokumen Renja dan entri aplikasi SiRUP awal tahun dan perubahan | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutammelalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi  | Sekretaris Dinas | TB 1,3     | TB 1,3     | Terlaksana |
| 3  | Kerangka Acuan Kerja Renja dan entri aplikasi SiRUP awal tahun dan perubahan                              | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutammelalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi  | Sekretaris Dinas | TB 1,3     | TB 1,3     | terlaksana |
| 4  | Melaksanakan inventarisasi kebutuhan  | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutan melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi | Sekretaris Dinas | TB 1,4     | TB 1,4     | terlaksana |
| 5  | Kerangka Acuan Kerja Renja dan entri aplikasi SiRUP awal tahun  | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutammelalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi  | Sekretaris Dinas | TB 1,3     | TB 1,3     | terlaksana |
| 6  | Updating aplikasi simela  | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutanmelalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi  | Sekretaris Dinas | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | terlaksana |

|    |  |   |                  |            |            |             |
|----|--|---|------------------|------------|------------|-------------|
| 7  | Kerangka Acuan Kerja Renja dan entri aplikasi SIRUP awal tahun   | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutanmelalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi  | Sekretaris Dinas | TB 1,3     | TB 1,3     | Terlaksana  |
| 8  | Koordinasi lintas sektor PMK 30 th 2022 tentang mutu pelayanan ,PMK 34 th 2019 tentang puskesmas       | Slaporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutanmelalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi | Sekretaris Dinas | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | Terlaksana  |
| 9  | Penguatan dari atasan kepada semua bidang u laporan tepat waktu Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutanmelalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi  | Sekretaris Dinas | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | terlaksana  |
| 10 | Penambahan jaringan dan aplikasi penguatan dari atas dalam sinkronisasi satu data                      | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutanmelalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi  | Sekretaris Dinas | TB 1       | TB 1       | terlaksana  |
| 11 | Pembinaan RS dan akreditasi Fasyankes  | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutanmelalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi  | Sekretaris Dinas | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | terlaksana  |
| 12 | Pembinaan nakes  | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutanmelalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi  | Sekretaris Dinas | TB 3,4     | TB 3,4     | -terlaksana |
| 13 | Anjab,Bimtek tenaga kesehatan  | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutanmelalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi  | Sekretaris Dinas | TB3,4      | TB3,4      | -terlaksana |

|    |   |  |                            |            |            |             |
|----|---|--|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 14 | Uji kompetensi                                  | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutannya melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi | Sekretaris Dinas kesehatan | TB 2       | TB 2       | -terlaksana |
| 15 | Aplikasi LPLPO dan stok opname tiap akhir bulan | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutannya melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi | Sekretaris Dinas kesehatan | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | -terlaksana |
| 16 | Sosialisasi PIRT dan perijinan PIRT gratis      | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutannya melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi | Sekretaris Dinas kesehatan | TB 1,2     | TB 1,2     | -terlaksana |
| 17 | Pemeriksaan Lab Air DAM tiap 3 bulan sekali     | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutannya melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi | Sekretaris Dinas kesehatan | TB 1,2     | TB 1,2     | -terlaksana |
| 18 | Sosialisasi di Poskestren                       | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutannya melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi | Sekretaris Dinas kesehatan | TB 3,4     | TB 3,4     | -terlaksana |
| 19 | Pelaksanaan Germas                              | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutannya melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi | Sekretaris Dinas kesehatan | TB 1,2     | TB 1,2     | -terlaksana |
| 20 | Bimtek terkait UKBM pada Nakes dan Kader        | Laporan pelaksanaan dan pemantauan berkelanjutannya melalui Sarana komunikasi (WA)sosialisasi,rapat koordinasi | Sekretaris Dinas kesehatan | TB 1,2     | TB 1,2     | -terlaksana |

## Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Tujuan Strategis Pemda : Kesehatan  
 Urusan Pemerintahan : Dinas Kesehatan  
 Dinas Terkait : Dinas Kesehatan

| No   | "Risiko" yang Teridentifikasi                           | Kode Risiko         | Kejadian Risiko |  | Keterangan  | RTP                   | Rencana Pelaksanaan RTP   | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan |            |
|--|---|---------------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|---------------------------|------------|------------|
|  |   |                     | Tanggal Terjadi | Sebab  |   |                       |   |                           |            |            |
| <b>Risiko Strategis OPD Dinas Kesehatan:</b> |   |                     |                 |  |   |                       |   |                           |            |            |
| 1  | Pelayanan kesehatan SPM bidang Kesehatan belum maksimal | RSO.23.0<br>1.13.02 | Maret 2023      | Kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal / belum terlaksana AKSI bergizi FERRAMEG | Tertundanya pelaksanaan pencanangan Aksi bergizi Ferrameg | Monitoring tahun 2023 | 1.Pemberian PMT balita Gizi buruk 2.Aksi bergizi melalui inovasi Ferameg(fe hari rabu pada remaja putri)<br>3.Pemanfaatan EPBGGM<br>4.Melaksanakan On Job Training pada Nakes<br>5.Memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui LASERKU<br>6.Pemantauan PD3I melalui aplikasi ASIK 7.Posbindu PTM skrining pada penderita DM dan HT pemantauan pelaporan 8.Pelaksanaan Reakkreditasi Puskesmas | TB 1,2,3,4                | TB 1,2,3,4 | Terlaksana |

|   |  |                     |   |  |  |                       |   |            |            |            |
|---|--|---------------------|---|--|--|-----------------------|---|------------|------------|------------|
| 2 | Tenaga kesehatan belum teregistrasi dengan bukti SIP dan STR   | RSO.23.0<br>1.13.02 | - | kelalaian nakes dalam pengurusan str dan sip Pengurusan ijin Berbelit SOP yang sulit di (OP) organisasi perawat  | Kualitas pelayanan Nakes rendah sehingga terjadi ketidak puasan di masyarakat. tidak bisa praktik baik mandiri dan di instansi Nakes bisa praktik baik mandiri dan di instansi | Monitoring tahun 2023 | 1.Sosialisasi pada nakes<br>2.pemetaan data nakes<br>3.Perijinan online<br>mempercepat birokrasi<br>4.Uji kompetensi pada nakes | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | Terlaksana |
| 3 | Terjadi kegagalan / keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan,obat dan BMHP dan temuan obat expired   | RSO.23.0<br>1.13.02 | - | -dalam pelaksanaan pengadaan alkes ,obat dan BMHP seringkali tidak dilaksanakan pada awal tahun,oleh karena persyaratan pelaksanaan pengadaan belum lengkap dan alkes ,obat dan BMHP tidak tersedia di e katalog | -Terdapat beberapa alat kesehatan,obat,BM HP yang tidak tersedia di puskemas Pemantauan ED Obat  | Monitoring tahun 2023 | 1.Pengentrian pengadaan alkes dan obat melalui aplikasi syrup 2.Pemantauan LPLPO dan stok opname tiap akhir bulan               | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | Terlaksana |
| 4 | Belum semua masyarakat mengikuti penumbuhan kesadaran dalam peningkatan derajat kesehatan dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat | RSO.23.0<br>2.13.02 | - | -Belum semua UKBM berPHBS  | -Belum semua UKBM melaksanakan indikator PHBS  | Monitoring tahun 2023 | Kegiatan pemberdayaan di masyarakat melalui posyandu balita ,posyandu remaja, posyandu Lansia dan Posbindu PTM                  | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | Terlaksana |

**Risiko Operasional OPD Dinas Kesehatan:**

|   |  |                     |   |   |  |                       |   |            |            |            |
|---|--|---------------------|---|---|--|-----------------------|---|------------|------------|------------|
| 1 | Jumlah dokumen laporan perencanaan tidak terselesaikan tepat waktu | ROO.23.0<br>1.13.02 | - | -Adanya intervensi dan kurangnya transparansi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan keterlambatan dokumen pelaporan(profil,ikjp,l kod,lppd ) data dari lintas bidang | -Perencanaan dan pelaporan tidak realiable   | Monitoring tahun 2023 | Penguatan dari atasan kepada semua bidang u laporan tepat waktu   | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | Terlaksana |
| 2 | Penyediaan administrasi dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu   | ROO.23.0<br>1.13.02 | - | -Ketersediaan anggaran di BPKAD dan Dokumen sumber transaksi tidak lengkap atau pembuatan dokumen tidak sesuai ketentuan  | -Keterlambatan penerimaan gaji / honor ASN dan PTT dan honda                       | Monitoring tahun 2023 | Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Kegiatan,Dokumen Renja dan entri aplikasi SIRUP awal tahun dan perubahan | TB 1,3     | TB 1,3     | Terlaksana |
| 3 | Administrasi kepegawaian tidak tercukupi dengan baik               | ROO.23.0<br>2.13.02 | - | Pagu anggaran di luar peencanaan  | -Tidak terpenuhi administrasi kepegawaian  | Monitoring tahun 2023 | Kerangka Acuan Kerja Renja dan entri aplikasi SIRUP awal tahun dan perubahan                              | TB 1,3     | TB 1,3     | terlaksana |
| 4 | administrasi umum yang tidak tercukupi                             | ROO.23.0<br>2.13.02 | - | -Terjadi peningkatan volume kebutuhan dan pemakaian komponen (listrik air tangga dan logistik kantor tidak tercukupi  | -penyediaan komponen listrik,alat rumah tangga dan logistik kantor tidak tercukupi | Monitoring tahun 2023 | Melaksanakan inventarisasi kebutuhan  | TB 1,4     | TB 1,4     | terlaksana |

|    |   |                     |   |   |  |                       |   |            |            |            |
|----|---|---------------------|---|---|--|-----------------------|---|------------|------------|------------|
| 5  | Administrasi pengadaan jasa penunjang tidak tercukupi   | ROO.23.0<br>3.13.02 | - | -Terlambatnya penyusunan dokumen pengadaan jasa penunjang   | -pelaksanaan pengadaan terhambat   | Monitoring tahun 2023 | Kerangka Acuan Kerja Renja dan entri aplikasi SiRUP awal tahun  | TB 1,3     | TB 1,3     | terlaksana |
| 6  | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah tidak tercukupi   | ROO.23.0<br>3.13.02 | - | -Terlambatnya pelaksanaan kegiatan  | -Kegiatan penyediaan perlengkapan kantor tertunda  | Monitoring tahun 2023 | Updating aplikasi simela  | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | terlaksana |
| 7  | Pemeliharaan barang milik daerah tidak terlaksana sepenuhnya  | ROO.23.0<br>2.13.02 | - | -Perencanaan kegiatan pemeliharaan pajak dan perijinan belum terakomodir keseluruhan  | -Pemeliharaan tidak tlaksana sepenuhnya  | Monitoring tahun 2023 | Kerangka Acuan Kerja Renja dan entri aplikasi SiRUP awal tahun  | TB 1,3     | TB 1,3     | Terlaksana |
| 8  | Fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp belum maksimal                                      | ROO.23.0<br>1.13.02 | - | -Rujukan ke rumah sakit jauh dan sejumlah bangunan mengalami kerusakan serta kurang tercukupi alkies,obat dan BMHP            | -Pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak optimal   | Monitoring tahun 2023 | Koordinasi lintas sektor PMK 30 th 2022 tentang mutu pelayanan ,PMK 34 th 2019 tentang puskesmas      | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | Terlaksana |
| 9  | Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota tidak maksimal | ROO.23.0<br>1.13.02 | - | -kurang koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaaan akreditasi dan dalam upaya peningkatan target kegiatan | -capaian SPM dan PKP belum semua 100% dan belum semua fasyankes terakreditasi dan reakreditasi | Monitoring tahun 2023 | Penguatan dari atasan kepada semua bidang ulaporan tepat waktu Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | terlaksana |
| 10 | Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi tidak tercapai                       | ROO.23.0<br>2.13.02 | - | -laringan internet tidak stabil sering terkendala dan belum terlaksananya 1 data dengan maksimal                              | -Terlambatnya pelayanman kepada pasien dan data tidak realtime serta proses lama               | Monitoring tahun 2023 | Penambahan jaringan dan aplikasi penguatan dari atas dalam sinkronisasi satu data                     | TB 1       | TB 1       | terlaksana |

|    |  |                     |   |  |  |                       |                                       |            |            |              |
|----|--|---------------------|---|--|--|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 11 | Penerbitan izin rumah sakit kleas C dan D dan fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak maksimal         | ROO.23.0<br>1.13.1  | - | -Belum adanya ijin memungkinkan belum tersedianya saraana dan prasarana yang memadai   | -masyarakat tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang optimal dan sesuai prosedur                              | Monitoring tahun 2023 | Pembinaan RS dan akreditasi Fasyankes | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | terlaksana   |
| 12 | Pemberian izin praktik Tenaga Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak maksimal   | ROO.23.0<br>1.13.02 | - | -persyaratan proses pengurusan ijin rumit  | -Belum sepenuhnya tenaga kesehatan yang bertanggungjawab dan memiliki keahlian dan kewenangan yang terlindungi | Monitoring tahun 2023 | Pembinaan nakes                       | TB 3,4     | TB 3,4     | - terlaksana |
| 13 | Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/kota tidak maksimal                       | ROO.23.0<br>2.13.02 | - | -Penetapan jumlah jenis, kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan tidak sesuai sepenuhnya penempatan SDM sesuai dengan tupoksi maksimal | -Terjadi kesalahan dalam pendelegasian wewenang  | Monitoring tahun 2023 | Anjab, Bimtek tenaga kesehatan        | TB3,4      | TB3,4      | - terlaksana |
| 14 | Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota tidak maksimal | ROO.23.0<br>2.13.02 | - | -Tim pengujii yang tersertifikasi internal belum tersedia di daerah  | -Tertundanya kenaikan jabatan pejabat fungsional kesehatan karena belum uji kompetensi                         | Monitoring tahun 2023 | Uji kompetensi                        | TB 2       | TB 2       | - terlaksana |

|    |  |                     |   |   |   |                       |   |            |            |              |
|----|--|---------------------|---|---|---|-----------------------|---|------------|------------|--------------|
| 15 | adanya Temuan obat yang tidak memenuhi syarat / kadaluarsa maka dapat mengganggu kesehatan masyarakat bahkan kematian  | ROO.23.0<br>1.13.1  | - | -Tingkat penegetahuan dan pelaku usaha apotik masih kurang  | -Beredarnya sedian farmasi (obat, obat tradisional, alkes, PKRT), dan kosmetik yang tidak memenuhi syarat dan expired di masyarakat | Monitoring tahun 2023 | Aplikasi LPLPO dan stok opname tiap akhir bulan | TB 1,2,3,4 | TB 1,2,3,4 | - terlaksana |
| 16 | Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IERT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga tidak maksimal | ROO.23.0<br>3.13.02 | - | -Uji sample makanan berbahaya   | -Usaha makanan skala rumahan belum berijin dan Kontaminasi pada pangan selama proses produksi berlangsung                           | Monitoring tahun 2023 | Sosialisasi PIRT dan perijinan PIRT gratis      | TB 1,2     | TB 1,2     | - terlaksana |
| 17 | Kurang terjaminya keamanan masyarakat sebagai konsumen (pembeli) warung, resto ran, dan depo air minum/DAM   | ROO.23.0<br>3.13.02 | - | -pengelolaan DAM yang tidak sesuai perda dan lingkungan kurang memenuhi syarat TPM                        | -Masih muncul masalah kesehatan dan KLB (diare)   | Monitoring tahun 2023 | Pemeriksaan Lab Air DAM tiap 3 bulan sekali     | TB 1,2     | TB 1,2     | - terlaksana |
| 18 | Advokasi,pembedayaan,kemitraan peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten / kota tidak maksimal   | ROO.23.0<br>3.13.02 | - | -pemberdayaan di pesantren kurang sehingga ketidakmampuan mendekripsi dan menyelesaikan masalah kesehatan | -Muncul permasalahan kesehatan yang tidak di waspada  | Monitoring tahun 2023 | Sosialisasi di Poskestren                       | TB 3,4     | TB 3,4     | - terlaksana |

|    |  |                     |   |  |   |                       |  |        |        |              |
|----|--|---------------------|---|--|---|-----------------------|--|--------|--------|--------------|
| 19 | Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif tingkat daerah kabupaten / kota tidak diterapkan                       | ROO.23.0<br>3.13.02 | - | -Promosi dan informasi tidak dikembangkan secara optimal sehingga informasi kesehatan pada masyarakat tidak tersampaikan dengan baik | -Masyarakat masih tergantung dengan pemerintah dan fsyankes akan penyelesaian masalah kesehatan | Monitoring tahun 2023 | Pelaksanaan Germas                       | TB 1,2 | TB 1,2 | - terlaksana |
| 20 | Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten / kota tidak maksimal | ROO.23.0<br>3.13.02 | - | -pengetahuan petugas kesehatan dan kader masih kurang serta peran serta masyarakat yang kurang                                       | -UKBM Tidak berkembang  | Monitoring tahun 2023 | Bimtek terkait UKBM pada Nakes dan Kader | TB 1,2 | TB 1,2 |              |